

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur vital dalam pelayanan kesehatan adalah obat. Hal ini dikarenakan obat digunakan untuk mengatasi gejala atau *symptom* dari suatu penyakit. Selain digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit, obat juga dapat digunakan untuk memelihara kesehatan karena peranannya yang mampu mencegah suatu penyakit. Menurut Permenkes RI (2016) menyatakan bahwa obat merupakan bahan tunggal atau campuran dari beberapa bahan, termasuk produk biologi yang penggunaannya ditujukan untuk penetapan diagnosis, mencegah penyakit, menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan, meningkatkan kesehatan dan kontrasepsi bagi manusia. Namun ketika penggunaan obat tidak tepat akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Pemberian informasi yang lengkap mengenai obat dan cara penggunaannya akan memberikan dampak pada terjaminnya pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.

Obat-obatan yang dijual dan diedarkan di pasaran tentu saja memiliki masa kedaluwarsa. Obat kedaluwarsa atau *expired* merupakan obat yang telah melewati batas tanggal kedaluwarsa yang dicantumkan oleh pihak pabrik pembuat pada bungkus dan wadah obat yang menunjukkan bahwa obat sudah dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan. Tanggal kedaluwarsa obat merupakan tanggal yang tercantum pada kemasan produk obat yang menunjukkan batas aman penggunaan obat, dimana obat yang tersimpan dengan baik sebelum tiba masa kedaluwarsanya

masih aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan jurnal yang dibuat oleh Basha *et al.*, (2015) tanggal kedaluwarsa obat adalah batas waktu akhir keamanan obat yang dijamin oleh pabrik pembuatnya.

Obat-obatan ketika sudah mengalami kedaluwarsa kemungkinan besar obat tersebut mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya bagi tubuh manusia apabila masih tetap dikonsumsi. Obat kedaluwarsa yang masih digunakan akan menyebabkan efek samping, selain itu manfaat dan kandungan kimia dalam obat akan hilang (Gul. *et al.*, 2016). Obat yang telah kedaluwarsa yang diberikan kepada pasien bisa saja mengakibatkan keadaan para pasien menjadi lebih buruk dan bukan menjadi sehat akibat dari obat yang telah kedaluwarsa tersebut.

Pelayanan yang bermutu di rumah sakit merupakan salah satu tujuan dari pengelolaan obat rumah sakit. Melalui pengelolaan obat, maka akan menjamin kecukupan jumlah ketersediaan obat ketika sewaktu-waktu dibutuhkan sehingga dapat meminimalisir kekosongan ataupun penumpukan stok pada gudang farmasi. Rumah sakit melakukan pengelolaan obat melalui Instalasi Farmasi. Pengelolaan obat kedaluwarsa menurut Permenkes RI No.72 Tahun 2016 dapat dilakukan dengan cara pemusnahan dengan tahapan membuat daftar obat kedaluwarsa, menyiapkan berita acara, mengkoordinasi jadwal, metode, dan tempat pemusnahan, peyiapan tempat pemusnahan, lalu melakukan pemusnahan.

Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat berbagai jenis obat yang mengalami kedaluwarsa. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kareri (2018) dalam judul "Pelaporan Obat

Rusak dan Kedaluwarsa di Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2017” menunjukkan bahwa obat kedaluwarsa yang terdapat pada Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Sumba Timur sejumlah 39 macam dari total 170 macam dalam pengadaan periode anggaran 2017. Persentase obat kedaluwarsa sebesar 22,94%. Bentuk sediaan obat yang mengalami kedaluwarsa adalah tablet (35,8%), sirup (17,9%), dan injeksi (15,38%). Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarwiyati (2019) dalam judul “Evaluasi Pengelolaan Obat Kedaluwarsa di Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) “Y” menunjukkan bahwa selama bulan Januari - Desember tahun 2018 persentase obat kedaluwarsa di Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Y Tahun 2018 adalah 1,85%. Obat kedaluwarsa yang paling banyak adalah Chlorpromazine 100 mg yaitu 600 box, dan cara untuk memusnahkan obat kedaluwarsa di Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Y pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018 adalah dengan cara obat kedaluwarsa tersebut diberikan kepada pihak ketiga.

Rumah Sakit Griya Waluya Ponorogo merupakan Rumah Sakit Tipe D dengan kasus jumlah obat kedaluwarsa yang cukup tinggi. Pada tahun 2018 jumlah obat kedaluwarsa atau *ED (Expired Date)* mencapai 1.037, tahun 2019 jumlah obat ED meningkat menjadi 1.114. Dan pada tahun 2020 jumlah obat ED juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 menjadi 1.139. Selain itu, pada bulan Oktober 2020 juga hampir terjadi KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) yaitu ketika ada resep Glimepiride 1 mg tablet sejumlah 60 tablet ternyata stok yang ada di poli sudah kedaluwarsa. Hal ini menyebabkan tidak terlayannya resep pasien sehingga pasien harus membeli resep obat tersebut di apotek luar. Dari

uraian tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan obat kedaluwarsa yang ada di RS Griya Waluya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara pengelolaan obat kedaluwarsa di rumah sakit tersebut, sehubungan dengan fungsi dari RS Griya Waluya yang menjadi salah satu pusat kesehatan sehingga untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan mengenai sistem pengelolaan obat kedaluwarsa pada instansi tersebut.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran pengelolaan obat kedaluwarsa di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Griya Waluya Ponorogo tahun 2020?
2. Apakah sudah sesuai dengan SOP di rumah sakit tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran pengelolaan obat kedaluwarsa di Instalasi Farmasi RS Griya Waluya Ponorogo tahun 2020.
2. Untuk mengetahui kesesuaiannya dengan SOP yang berlaku di RS Griya Waluya Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Sebagai masukan terhadap manajemen RS Griya Waluya dalam penentuan kebijakan pengelolaan obat kedaluwarsa sehingga dapat memperbaiki penanganan obat kedaluwarsa.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya terutama dalam tema yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan, serta dapat dijadikan masukan di tempat kerja untuk memperbaiki pengelolaan obat kedauwarsa.